

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan terkait evaluasi perlakuan akuntansi aktiva tetap dan penyajian dalam laporan keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut PP 71 Tahun 2010 diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi asset tetap pengakuan, pengukuran/penilaian, penilaian awal, penyusutan, penghentian atau pelepasan, pengungkapan serta penyajiannya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pada prinsipnya sudah sesuai PP No. 71 Tahun 2010.
2. Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pengukuran aset tetapnya diperoleh melalui pembelian dan aset tetapnya dinilai berdasarkan nilai perolehannya. Hal itu sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.
3. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menerapkan penyusutan asetnya dimana perhitungan penyusutan asetnya menggunakan metode garis lurus. Jadi kebijakan penyusutan aset tetap yang sudah diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.
4. Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur belum melakukan penghapusan atau pelepasan terhadap aktiva tetap yang masa manfaatnya sudah habis dan kondisinya sudah rusak.

5. Dalam menyajikan komponen aset tetapnya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyajikan laporan posisi keuangannya dengan baik dan benar, dimana dalam menghitung jumlah aset tetap yang disajikan didalam neraca sudah sama dengan jumlah harga perolehan yang terdapat dalam data inventaris barang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan hal-hal berikut agar perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik berdasarkan PP 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan penghapusan bagi Aset Tetap yang tidak memberikan manfaat lagi bagi instansi dan yang masa manfaatnya telah melampaui batas.
2. Pemerintah wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mayasani N Dewi. 2017. *Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Kendari*. Jurnal Akuntansi (JAK).
- Muhamad. S. Maryam, Tinangon. J, Elin. I. 2014. *Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Unsrat. Manado
- Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.02/2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan andan Penelaahan RKA-KL Tahun 2006*. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Syafitri, Lily 2012 *Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang*, Universitas Tridianti Palembang. Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.2 No.1 September 2012, Diakses 16 Februari 2016, Hal 54.
- Syaiful. SE., Ak., MM. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.

<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>

Suparman & Sangadji. 2018. *Pengelolaan Aset Daerah dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian barat Propinsi Maluku*. Jurnal KELOLA :Jurnal Ilmu Sosial Vol.1 No.2 Tahun 2018. Bandung